



Korupsi Dana Hibah Fiktif

Oknum Dewan Akhirnya Tersangka

Semarang (Bali Post) -

Setelah melakukan penyelidikan, penyidik Polres Klungkung akhirnya menetapkan oknum anggota DPRD Klungkung I Wayan Kicen Adnyana sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dana hibah fiktif sebesar Rp 200 juta. Dana hibah itu digunakan untuk pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan di Dusun Anjingan, Desa Getakan, Banjarangkan.

Tak hanya Kicen yang ditetapkan sebagai tersangka, putrinya bernama Ni Kadek Endang Astiti juga mengalami nasib serupa. Penyidik menetapkan Endang sebagai tersangka karena diduga ikut terlibat dalam kasus tersebut. Endang duduk sebagai bendahara di panitia pembangunan. Sebelumnya, Ketut Krisnia Adiputra yang duduk sebagai

Ketua Panitia Pembangunan juga ditetapkan lebih dulu jadi tersangka.

Terkait penetapan tersangka terhadap Kicen ini, Kapolres Klungkung AKBP FX Arendra Wahyudi tidak menampikannya. Menurut Kapolres, Kicen bersama anaknya (Endang - red) ditetapkan jadi tersangka pada 24 Februari lalu. Politisi dari Partai

Gerindra ini diduga sebagai "aktor" di balik kasus dana hibah fiktif tersebut. "Ada tiga orang yang telah kita tetapkan jadi tersangka. Satu perempuan dan dua laki-laki, termasuk anggota dewan," kata Kapolres Arendra, Rabu (8/3) kemarin.

Meski telah menetapkan tiga orang tersangka, namun penyidik tidak melakukan pe-

nahanan. "Untuk penahanan, kita akan bicarakan sama tim karena ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan," ujar Kapolres Arendra.

Sementara itu, pengacara Endang, I Gede Sukerta bersama Wayan Suamba, mengatakan kalau kliennya (Endang - red) tidak mengetahui sama sekali terkait kasus yang menjeratnya. Menurut Sukerta, kliennya hanya menandatangani proposal tersebut dan mengambil uang di BPD. Proposal tersebut juga ditandatangani oleh Endang atas permintaan adiknya, Krisnia Adiputra. "Bu Endang hanya lihat sudah ada

bahan bangunan di sana. Pembelian bahan bangunan juga dihentikan setelah ada pemeriksaan dari BPK dan BPKP," terangnya.

Terkait penetapan tersangka ini, Kicen Adnyana belum bisa dikonfirmasi. Beberapa kali dihubungi lewat ponselnya, namun tidak aktif. Namun, Sekwan Klungkung Wayan Sudiarta mengakui ada surat dari Polres yang masuk ke DPRD Klungkung terkait Wayan Kicen Adnyana. Tetapi pihaknya tidak mengetahui secara pasti surat tersebut, sehingga ditembuskan langsung ke Badan Kehormatan. (kmb)

Edisi : Jumat, 10 Maret 2017

Hal : _____



Lagi, Dua Oknum Pegawai Dishub Terjaring OTT



AMANKAN - Tim Saber Pungli Klungkung mengamankan dua petugas Dishub yang melakukan pungli di depan pintu masuk Terminal Galiran, Selasa (7/3) sore. Bali Post/ist

Semarapura (Bali Post) -

Meski sudah ada yang ditangkap karena melakukan pungutan liar (pungli) di Terminal Galiran, Klungkung, rupanya tak menyurutkan pelaku lainnya untuk berbuat sama. Sebelumnya, Tim Saber Pungli Kabupaten Klungkung menangkap oknum pegawai Dinas Perhubungan (Dishub) Klungkung A.A. Gde Anom Putra Suartika. Kini Tim Saber Pungli mencokok dua oknum pegawai kontrak Dishub Klungkung yakni I Made Sudiartana (38) asal Banjar Bias, Kusamba, Dawan dan I Nyoman Sukarta asal Dusun Leping Kangin, Desa Takmung, Banjarangkan.

Kedua oknum ini kena operasi tangkap tangan (OTT) setelah diketahui melakukan pungli di depan pintu masuk

Terminal Galiran, Selasa (7/3) kemarin sekitar pukul 16.00 Wita. Modus pelaku dengan cara memberikan tiket masuk kepada sopir *pick-up* sebesar Rp 5.000. Padahal sopir *pick-up* seharusnya sesuai aturan hanya dikenakan tiket masuk warna merah (bus atau *pick-up*) sebesar Rp 3.000. Tetapi sopir *pick-up* ini juga dikenakan biaya tambahan lagi sebesar Rp 2.000 untuk uang kebersihan. Dengan demikian, atas perbuatannya tersebut, kedua oknum ini dinilai telah melanggar Perda Klungkung Nomor 7 Tahun 2013 pasal 12 ayat 4 yo pasal 22 tentang Retribusi Terminal.

Dari tangan kedua pelaku, petugas mengamankan barang bukti berupa tiket masuk, sebuah buku besar dan kecil catatan setoran, satu buah

kotak plastik. Termasuk uang pungutan Rp 609.000. Semua uang tersebut merupakan hasil pungutan pada 7 Maret 2017 sebesar Rp 129.000 yang terdiri dari Rp 42.000 hasil OTT dan Rp 87.000 hasil pungutan retribusi masuk terminal. Sedangkan biasanya sebesar Rp 480 ribu merupakan uang setoran dari tanggal 1 sampai 6 Maret 2017.

Kasat Reskrim Polres Klungkung AKP Wiastu Andri Prajitno ketika dikonfirmasi mengakui adanya penangkapan kedua pegawai Dishub tersebut. Menurut Kasat Reskrim, keduanya masih menjalani pemeriksaan di Mapolres. "Keduanya tidak ditahan dan kini masih menjalani pemeriksaan," ujar AKP Wiastu Andri Prajitno. (kmb)

Edisi : Jumat, 10 Maret 2017

Hal : 10



Soal Dugaan Korupsi Dana KKP-E Rp 1 Miliar di Kesian

Lagi, Jaksa Panggil 10 Penerima Dana

Gianyar (Bali Post) -

Kejaksaan Negeri (Kejari) Gianyar kembali melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dalam kasus penyimpangan dana Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE). Pemeriksaan yang dilaksanakan Kamis (9/3) kemarin, dilakukan untuk melengkapi audit dari BPKP Bali dalam penyelewengan dana senilai Rp 1 miliar oleh kelompok Tani Ternak Dharma Canthi, Kesian, Desa Lebih, Gianyar.

Pantauan di lapangan, ada sepuluh saksi penerima dana KKPE yang mengikuti pemeriksaan di Kejari Gianyar. Mereka mendatangi kantor yang beralamat di Jalan Ciung Wanara itu secara bergantian sejak pagi hingga siang. Sepuluh orang saksi dimaksud yakni I Wayan Suwala, I Gede Atmika, I Nyoman Widiarsa, Gede Wanira, Ketut Murta, Made Sulendra, Wayan Tisna, Ketut Tamayasa, I Nyoman Subagia Negara, dan Made Suryana.

Kasi Pidana Khusus (Pid-sus) Kejari Gianyar Made Endra Arianto menjelaskan, pemeriksaan terhadap sepuluh saksi ini dilakukan secara bertahap. "Mereka tidak diperiksa sekaligus, tetapi dibagi dua. Lima orang diperiksa pagi harinya dan lima orang lagi siang hari. Mereka juga diperiksa secara terpisah," katanya.

Diungkapkannya, pemeriksaan ini dilakukan untuk melengkapi hasil ekspos pemeriksaan BPKP Bali. Sebelumnya,

pihaknya sudah mengajukan ke BPKP tetapi berdasarkan hasil ekspos, BPKP memandang perlu adanya penegasan dari beberapa saksi yang telah diperiksa.

Lebih lanjut Endra mengatakan, setelah pemeriksaan, hasilnya akan diserahkan kembali ke BPKP pada pekan depan. Pihaknya meminta agar BPKP secepatnya memberikan hasil kajian. Diharapkan hasil sudah keluar sebelum Maret berakhir. "Kita akan minta BPKP segera memberikan hasilnya sehingga kami bisa secepatnya menetapkan tersangka," ujarnya.

Menurutnya, permasalahan

han dari KKPE ini bukan menyangkut berapa besar kerugian negara tetapi telah adanya penyimpangan pemberian kredit. Ada beberapa penerima kredit yang bukan merupakan anggota. Sedangkan di sisi lain ada anggota yang tidak mendapatkan kredit. Bahkan ironisnya, kredit yang seharusnya untuk peternak, justru dinikmati PNS.

"Dari segi pengembalian memang tidak masalah. Tetapi ada penyimpangan pemberian kredit. Kredit yang seharusnya diberikan kepada peternak justru diberikan kepada PNS yang bukan peternak," jelasnya.

Endra mengungkapkan langkah ini merupakan pemeriksaan terakhir. Selanjutnya pihaknya tinggal menunggu hasil dari BPKP dan menetapkan tersangka. "Kita ingin akhir Maret sudah ada penetapan tersangka. Tunggu saja," ujarnya.

Sementara itu, beberapa saksi saat dimintai keterangan usai menjalani pemeriksaan ada yang mengatakan pemeriksaan dari penyidik hampir sama dengan pemeriksaan sebelumnya. Namun, beberapa saksi memilih bungkam dan berlalu meninggalkan kantor Kejari Gianyar. (kmb35)

Edisi : Jumat, 10 Maret 2017

Hal : _____